ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEPUTUSAN RAPAT
APJII *OPEN POLICY MEETING* TAHUN 2023

KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa APJII *Open Policy Meeting* ("**OPM**") adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII kepada Anggota APJII dan publik;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Keputusan *Open Policy Meeting* APJII Tahun 2023.

Memperhatikan :

a. Pasal 1 Ayat (20) Anggaran Dasar APJII.
b. Pasal 45 Ayat (5) dan Pasal 56 Anggaran Rumah Tangga APJII.
c. Berita Acara Nomor 002/APJII/BA/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* APJII Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM TENTANG PENETAPAN KEPUTUSAN RAPAT APJII *OPEN POLICY MEETING* TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Keputusan APJII *Open Policy Meeting* Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 17 MEI 2023

MUHAMMAD ARIF
KETUA UMUM

Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

BERITA ACARA KEPUTUSAN RAPAT
***OPEN POLICY MEETING* APJII TAHUN 2023**
NOMOR: 002/BA/APJII/V/2023

Pada hari ini, **RABU** tanggal **TUJUH BELAS** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA (17-05-2023)** bertempat di **HOTEL GRAND SAHID JAYA JAKARTA**, telah dilaksanakan **RAPAT *OPEN POLICY MEETING* APJII TAHUN 2023** (selanjutnya disebut "**OPM APJII 2023**") dengan tema **"TATA KELOLA TEKNIS KUAT TRANSFORMASI DIGITAL HEBAT"** dan telah menetapkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

DASAR HUKUM:

1. Pasal 1 Ayat (20) ANGGARAN DASAR APJII "KETENTUAN UMUM" ANGGARAN DASAR APJII:
   APJII *Open Policy Meeting* adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII kepada publik.

2. Pasal 45 Ayat (5) *jo*. Pasal 56 ANGGARAN RUMAH TANGGA APJII "FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT":
   Pasal 45 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga:
   "APJII *Open Policy Meeting* (OPM) maksimal 2 (dua) kali setiap 1 (satu) tahun."

   Pasal 56 Anggaran Rumah Tangga:
   1. Tujuan utama APJII *Open Policy Meeting* adalah membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII kepada publik.
   2. APJII *Open Policy Meeting* diselenggarakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
   3. APJII *Open Policy Meeting* diselenggarakan oleh Dewan Pengurus.
   4. Hal-hal utama yang dibahas dalam APJII *Open Policy Meeting* adalah:
      a. NIR *(National Internet Registry)*, layanan small multihoming yang difasilitasi oleh Anggota APJII, http://www.apjii.or.id
      b. IDNIC *(Indonesia Network Information Center)* meliputi Pelayanan Penomoran PI dan ASN, http://www.idnic.net.id
      c. IIX *(Indonesia Internet Exchange)*, Jaringan Interkoneksi Internet di Indonesia, http://www.iix.net.id
      d. Hal-hal lain yang belum diatur terkait dengan fasilitas APJII.
   5. APJII *Open Policy Meeting* dihadiri oleh:
      a. Dewan Pengawas
      b. Dewan Pengurus
      c. Pengurus Wilayah
      d. Anggota APJII
      e. Badan Pelaksana Harian, dan
      f. Undangan Khusus dan/atau Peninjau yang jumlah dan namanya ditentukan oleh Dewan pengurus.

TUV NORD Indonesia ISO 27001:2013 Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
CERTIFICATION DE SERVICES ISO 9001 SGS UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

I. OPM SESSION 1: SOSIALISASI PERATURAN ASOSIASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN

A. Penyampaian Sosialisasi Peraturan Asosiasi tentang Perubahan atas Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keanggotaan

1. Terdapat 8 (delapan) dasar hukum dari Perseroan Perorangan:
   a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU No. 6/2023**").
   b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No.5/2021**").
   c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("**PP No.7/2021**").
   d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil ("**PP No. 8/2021**").
   e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor PI ("**PM No.32/2015**").
   f) Peraturan Menteri Komunikasi \dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ("**PM No.13/2019**").
   g) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 785 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet Nasional ("**Kepmen Kominfo No.785/2017**").
   h) Anggaran Dasar APJII sebagaimana terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 10 Tanggal 20 Januari 2016 ("**Anggaran Dasar APJII**").
2. Dengan terbitnya PP No. 5/2021 menyatakan dengan adanya RBA (*Risk Based Approach*) dalam *Sistem Online Single Submission* ("**OSS**"), maka setiap perusahaan (termasuk Perseroan Perorangan) dibebaskan untuk memilih kualifikasi usahanya.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Permenkominfo No.13/2019, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi harus berbadan hukum dan badan swasta.
4. Permenkominfo No. 32/2015 khususnya dalam Pasal 9 Ayat (2) peraturan tersebut merupakan syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi Pengelola Nomor PI Nasional.
5. Berdasarkan Kepmen Kominfo No. 785/2017 sebagai penegasan bahwa Pendelegasian Nomor PI di Indonesia diserahkan kepada APJII.

TUV NORD Indonesia ISO 27001:2013 Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
ISO 9001 SGS UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

6. Adapun hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan Anggaran Dasar APJII khususnya dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa individu dapat menjadi Anggota IDNIC-APJII.
7. Surat elektronik Subdit Jastel tertanggal 23 Desember 2022 mengenai pengalokasian *IP Address* dan *Autonomous System Number* (ASN) dari IDNIC untuk Perseroan Perorangan.
8. Pada 9 Januari 2023, APJII pada prinsipnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Perorangan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
9. Pada 29 Maret 2023, Dirtel mengirimkan surat tanggapan bahwa pengajuan permohonan Nomor PI dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukannya sebagaimana Perseroan Perorangan memiliki status yang sama sebagai badan hukum dengan Perseroan Terbatas dalam hal pengajuan permohonan perizinan berusaha.
10. Sebelumnya, Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keanggotaan tidak mengatur mengenai Surat Pernyataan Pendirian dan Sertifikat Pendaftaran Pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM untuk Perseroan Perorangan.
11. Penghapusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dalam Pasal 15 Ayat (3) tersebut dikarenakan sudah tidak berlaku lagi.
12. Berdasarkan pertimbangan dan tanggapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bidang Regulasi dan Advokasi telah membuka kembali pembahasan mengenai Perseroan Perorangan dan mensosialisasikan perihal Perseroan Perorangan agar dapat menjadi Anggota IDNIC-APJII.

B. Tanggapan Atas Sosialisasi tentang Perubahan atas Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keanggotaan

1. Tanggapan/Usulan 1:
   - Bapak Valentinus Yanuar Riyadi dari PT Jembatan Citra Nusantara, menyetujui untuk menganulir hasil APJII OPM tahun 2022 mengenai Pengalokasian Nomor IP karena harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Lebih lanjut, dengan merujuk pada *policy* yang berlaku di APNIC, memang sudah seharusnya untuk diakomodir.
   - Namun, terdapat beberapa permasalahan yang di mana terdapat banyak institusi-institusi lain yang didirikan dengan SK kementerian lainnya yang juga menggunakan Nomor PI, sehingga APJII harus mendefinisikan lebih luas lagi terkait pihak-pihak yang dapat menjadi Anggota IDNIC-APJII.

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

2. Tanggapan/Usulan 2:
   - Bapak Willy Rinaldy Amin dari PT Quanta Tunas Abadi memberikan pandangan apakah dengan diakomodirnya Perseroan Perorangan menjadi Anggota IDNIC-APJII, nantinya akan ada dorongan Perseroan Perorangan untuk dapat diakomodir menjadi perusahaan penyelenggara jasa internet atau *Internet Service Provider* (**"ISP"**) dan menjadi Anggota Penyelenggara APJII.
   - Bapak Valentinus Yanuar Riyadi dari PT Jembatan Citra Nusantara menanggapi pernyataan Bapak Willy bahwa Perseroan Perorangan bukan hanya mendapatkan Nomor PI hanya dari APJII namun bisa secara langsung kepada APNIC. Perseroan Perorangan yang mendapatkan Nomor PI dari APNIC dapat menjadi penyelenggara telekomunikasi.
   - **Jawaban dari Ketua Bidang Regulasi dan Advokasi atas tanggapan Bapak Willy Rinaldy Amin dari PT Quanta Tunas Abadi:**
     Apabila nantinya Perseroan Perorangan bisa mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka implikasinya adalah APJII mempunyai keharusan untuk juga mengakomodir Perseroan Perorangan sebagai Anggota Penyelenggara.

3. Tanggapan/Usulan 3:
   - Bapak Supriyanto dari PT Giga Prima Lestari menyatakan bahwa Perseroan Perorangan tidak hanya bisa mendapatkan Nomor PI dari IDNIC-APJII, tetapi bisa langsung *direct* ke APNIC.

4. Tanggapan/Usulan 4:
   - Bapak Parlin Pasaribu dari PT Wave Communication Indonesia tidak menyetujui apabila APJII mengakomodir Perseroan Perorangan menjadi Anggota IDNIC-APJII, karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**"UU No. 11/2020"**) yang disahkan dapat sewaktu-waktu berubah.
   - Selain itu, karena Perseroan Perorangan diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro dan Kecil, dipandang tidak tepat apabila dipersamakan dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi Anggota IDNIC-APJII.

5. Tanggapan/Usulan 5:
   - Bapak Bahar Religia dari PT Inditech Global Network menyampaikan bahwa kedepannya apabila Perseroan Perorangan nantinya dapat menjadi perusahaan penyelenggara jasa internet, Anggota Penyelenggara APJII akan menjadi banyak. Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana cara APJII mengatur dan memberikan ruang contohnya seperti mengatur atau membuat kebijakan terkait penetapan harga untuk persaingan usaha kedepannya dengan persaingan usaha yang nantinya akan menjadi lebih ketat.

Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

6. Tanggapan/Usulan 6:
   - Bapak Firdhyan Adhi Lesmana dari PT Kawan Informatika Teknologi Abadi menyampaikan bahwa pembahasan saat ini adalah mengenai pengalokasian Nomor PI, dalam hal ini hanya sebagai Anggota IDNIC-APJII. Sehingga perlu diperbaiki kembali mengenai perizinan dari suatu badan.
   - Apabila Perseroan Perorangan sudah menjadi badan yang sah dan memperoleh perizinan dari OSS, maka hal ini tidak menjadi permasalahan.

7. Tanggapan/Usulan 7:
   - Perlu dipahami bahwa UU No. 11/2020 diterbitkan dalam rangka untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Sehingga, dipandang perlu untuk membuka kesempatan bagi Perseroan Perorangan, mengingat bahwa Perseroan Perorangan juga memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha.

8. Tanggapan/Usulan 8:
   - Bapak Wenas Ongkowinoto dari PT Media Cepat Indonesia - JTL memberikan pandangan bahwa APJII sebagai organisasi nasional memiliki induk, yaitu *Asia Pacific Network Information Centre* (**"APNIC"**). Perseroan Perorangan dapat diartikan selayaknya individu. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini di APNIC, individu tidak bisa mendapatkan Nomor PI secara langsung dari APNIC. APJII sebagai organisasi harus memiliki rencana untuk (/23). Secara konkrit, APJII harus mensinkronisasi ketentuan yang diatur oleh APNIC.

9. Tanggapan/Usulan 9:
   - Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia menyampaikan bahwa saat OPM Tahun 2022 sudah pernah menyampaikan mengenai hal ini pada POKJA AD/ART bahwa ada kemungkinan bertentangan dengan AD/ART APJII. Namun sebagai jalan keluar, baiknya kita definisikan mengenai hal-hal atau fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati oleh Perseroan Perorangan karena ini dapat menjadi pemasukan yang baik untuk kepentingan APJII. Jika hal ini diakomodir APJII harus transparan dalam menjalankan fasilitasnya.
   - Jika dimungkinkan APJII dapat mengajukan *Judicial Review* UU No. 11/2020 jika tidak ingin mengakomodir Perseroan Perorangan untuk menjadi Anggota APJII.

C. Keputusan Atas Sosialisasi Peraturan Asosiasi tentang Perubahan atas Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keanggotaan

1. Peserta OPM APJII Tahun 2023 menyepakati dan menyetujui perubahan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 1

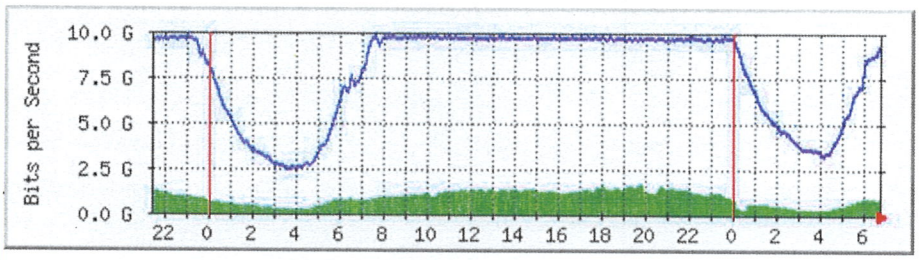
Tahun 2020 tentang Keanggotaan yang tercantum dalam Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2023.

2. Untuk selanjutnya, APJII akan mengakomodir Perseroan Perorangan untuk dapat menjadi Anggota IDNIC-APJII.
3. Selain itu, merujuk pada pernyataan Ketua Bidang Regulasi dan Advokasi apabila di kemudian hari Perseroan Perorangan bisa mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Perseroan Perorangan juga akan diakomodir menjadi Anggota Penyelenggara.

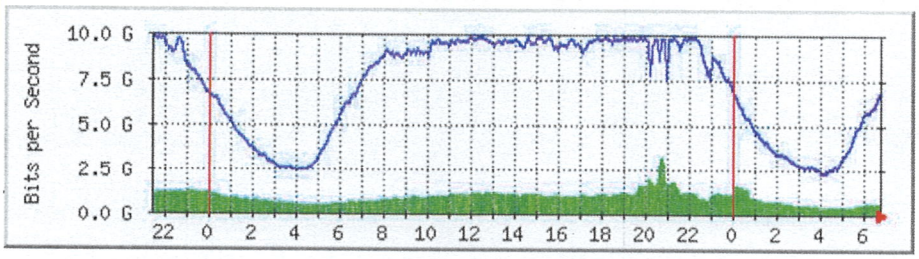
II. OPM SESSION 2: PENYAMPAIAN PROPOSAL PT ARAZ INTI LINE (*CALL FOR PROPOSAL* 1)

A. Penyampaian Usulan Kebijakan: *"No IIX Traffic Congestion for Better Indonesian Internet"*

1. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara. Namun kecepatan internet di Indonesia masih tergolong lambat dibandingkan dengan negara-negara lain di Kawasan Asia Tenggara.



	Max	Average	Current
In	1600.5 Mb/s (16.0%)	881.3 Mb/s (8.8%)	804.2 Mb/s (8.0%)
Out	9783.0 Mb/s (97.8%)	7690.4 Mb/s (76.9%)	9265.8 Mb/s (92.7%)



	Max	Average	Current
In	3100.2 Mb/s (31.0%)	876.8 Mb/s (8.8%)	565.6 Mb/s (5.7%)
Out	9781.9 Mb/s (97.8%)	7040.6 Mb/s (70.4%)	6752.2 Mb/s (67.5%)

2. Permasalahan:
   a) Memiliki banyak konten dan melakukan *direct peering* ke IIX, namun *interface ethernet* tidak di *upgrade*, hal ini berdampak pada lambatnya akses internet ke beberapa konten yang dibutuhkan pengguna internet.
   b) Ketika memiliki *server speedtest* dan *best path*, namun *interface ethernet* ke arah IIX tidak di *upgrade*, menyebabkan hasil *survey* Ookla untuk negara Indonesia tidak relevan.
3. Solusi:
   a) Memonitor dan melakukan *upgrade interface ethernet* pada setiap anggota yang telah melakukan *direct peering* ke IIX apabila sudah mencapai 80% (delapan puluh persen) *peak traffic*; atau
   b) Melakukan *disable peering* ke IIX apabila *interface ethernet* yang digunakan tidak kunjung di *upgrade*.
4. *Peering* mempengaruhi *network* dari para Anggota.

B. Tanggapan Atas Usulan Kebijakan *Call for Proposal* 1

1. Tanggapan/Usulan 1:
   - Bapak Ricky Simanjuntak dari PT Parsaoran Global Datatrans, menyetujui dengan adanya usulan ini. Seringkali, *customer* menyalahkan Anggota selaku ISP. Apabila tidak dilakukan *upgrade*, maka sebaiknya dilakukan *drop*.
   - Bapak Ricky Simanjuntak memberikan pandangan bahwa apabila terjadi permasalahan antar *network*, dalam rentang waktu tertentu perlu dikonfirmasi mengenai kewenangan Network Operation Center (**"NOC-APJII"**) untuk melakukan *disable port* yang tidak merespon, apabila telah dilakukan *follow-up* dan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam tidak ada respon.
   - Seharusnya konten tidak dapat tersambung melalui IIX secara langsung, melainkan harus melawati Anggota terlebih dahulu.
   - Perlu diperhatikan bahwa mitigasi tidak hanya mendapati temuan 80 % (delapan puluh persen) namun juga diinformasikan jika terjadi masalah pada port tersebut oleh NOC APJII.

2. Tanggapan/Usulan 2:
   - Bapak Michael Takeuchi dari PT Media Cepat Indonesia, terhadap solusi "Melakukan *disable peering* ke IIX apabila *interface ethernet* yang digunakan tidak kunjung di *upgrade*" apa tolak ukur tidak kunjung di-*upgrade*, apakah per waktu atau ada hal lain. Dipandang perlu untuk ditentukan mengenai jangka waktu dari *upgrade* yang dimaksud.

Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

- Menanggapi bahwa kebijakan ini bersifat krusial dan harus diatur dengan jelas untuk menghindari *dispute* pada masa yang akan datang.
- Usulan: periodisasi untuk melakukan *upgrade* setidaknya dapat dilakukan setiap selama 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sekali.

3. Tanggapan/Usulan 3:
   - Bapak Valentinus Yanuar Riyadi dari PT Jembatan Citra Nusantara pada dasarnya menyetujui usulan dalam *Call for Proposal* 1. Namun, ukuran 80% (delapan puluh persen) *peak traffic* harus didefinisikan dengan jelas ukurannya. Oleh sebab itu, perlu diketahui dan diatur dengan jelas mengenai penentuan ukuran 80% (delapan puluh persen) *peak traffic* dan pihak yang menentukan ukuran dari 80% (delapan puluh persen) *peak traffic* yang dimaksud.
   - Perlu dipahami bahwa aturan ini juga mengikat bagi Dewan Pengurus, bukan hanya Anggota. Ketentuan ini perlu dimasukkan dalam sebuah instrumen hukum atau perjanjian saat hendak menyambungkan koneksi pada IIX.

4. Tanggapan/Usulan 4:
   - Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia menyetujui tanggapan dari Bapak Michael Takeuchi PT Media Cepat Indonesia dan kembali menyatakan bahwa diperlukan solusi secara konkrit atas permasalahan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Aziz Priyatna dari PT Araz Inti Line selaku pemberi *Call for Proposal.*
   - Karena OPM Tahun 2023 ini dapat berlaku juga selain di APJII Pusat, maka diperlukan penegasan terkait keberlakuan OPM Tahun 2023 ini ditujukan hanya untuk APJII Pusat saja atau berlaku juga ke APJII Wilayah.

5. Tanggapan/Usulan 5:
   - Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten menyampaikan bahwa *upgrade* sebaiknya dilakukan secara 3 (tiga) bulan karena jika *upgrade* dilakukan 1 (satu) bulan sekali terhitung terlalu cepat. Hal ini dikarenakan harus dilakukan upaya mitigasi terlebih dahulu.
   - Perlu adanya surat notifikasi sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulannya sebagai bentuk mitigasi oleh NOC-APJII.
   - Perlu ada perbedaan antara surat pemberitahuan dan surat peringatan dengan jangka waktu yang berbeda.

Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

6. Tanggapan/Usulan 6:
   - Bapak Firdhyan Adhi Lesmana dari PT Kawan Informatika Teknologi Abadi berpandangan bahwa setelah 3 (tiga) bulan dapat dikirimkan *record* dalam surat notifikasi yang diusulkan oleh Bapak Syarifuddin bahwa perusahaan terkait sudah mencapai 80% (delapan puluh persen) *peak traffic* dalam *direct peering* ke IIX. Jangka waktu 3 (tiga) bulan dipandang terlalu singkat untuk melakukan mitigasi.
   - Usulan: dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Kemudian, bagi Anggota yang telah melebihi 80% (delapan puluh persen) akan menerima surat evaluasi yang menginstruksikan untuk melakukan *upgrade* terhadap Interface.
   - Bapak Firdhyan Adhi Lesmana mengkonfirmasi bahwa apabila pada awalnya mengalami kenaikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan kemudian turun dari 80% (delapan puluh persen), maka secara otomatis ketentuan mengenai *soft block* ini tidak berlaku.

7. Tanggapan/Usulan 7:
   Bapak Rivan Firman Maulana dari PT Bina Techindo Solution memberikan usulan bahwa keputusan untuk melakukan *upgrade* berada pada perusahaan, bukan pada APJII. Mengingat bahwa perusahaan memiliki dan memahami kebutuhannya masing-masing.

8. Tanggapan/Usulan 8:
   Bapak Willy Rinaldy Amin dari PT Quanta Tunas Abadi berpandangan bahwa masa upgrade itu selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan. Bapak Willy Rinaldy Amin menanyakan dan mengusulkan perlu diperjelas mengenai bagaimana upgrade untuk port sebesar 100G.

9. Tanggapan/Usulan 9:
   Bapak Supriyanto dari PT Giga Prima Lestari, perlu untuk dikonfirmasi berkenaan dengan keberlakuan kapasitas yang dimaksud apabila *downgrade* dilakukan sendiri oleh Anggota.

C. Keputusan atas Usulan Kebijakan *Call for Proposal* 1

1. Peserta OPM APJII Tahun 2023 menyepakati *Call for Proposal* 1 secara keseluruhan, ditetapkan bahwa jangka waktu mitigasi dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berdasarkan *traffic* MRTG IIX-APJII melalui pemberitahuan dari NOC-APJII kepada Anggota yang dilakukan 1 (satu) bulan setelah dilakukannya mitigasi.

2. Selanjutnya, disepakati adanya Surat Pemberitahuan dari NOC-APJII setelah dilakukannya mitigasi kepada Anggota sebagai pemilik *Port* yang telah melebihi 80% (delapan puluh persen) pemakaian *Port*/perangkat.
3. Anggota diberikan kesempatan untuk *upgrade Interface* setelah mitigasi yang dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
4. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dilakukan *upgrade*, maka terhadap *Port* tersebut akan dilakukan *soft block* berdasarkan pemberitahuan terlebih dahulu dari NOC-APJII.
5. NOC-APJII akan melakukan pencabutan kabel dari *Port* setelah dilakukannya *soft block* sebagaimana poin 4, agar dapat dimanfaatkan oleh Anggota APJII lainnya.

III. OPM SESSION 3: PENYAMPAIAN PROPOSAL PT JASNITA TELEKOMINDO (*CALL FOR PROPOSAL* 2)

A. Penyampaian Usulan Kebijakan:

1. Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Telekomunikasi), dengan usulan sebagai berikut:
   a) Agar pemberian sanksi administrasi dilakukan secara berjenjang.
   b) Agar pengenaan denda atau pencabutan izin dikembalikan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk memilih, sehingga penjatuhan sanksi administratif nantinya sudah berdasarkan persetujuan dari penyelenggara telekomunikasi terkait. Mengingat bahwa denda memiliki jenjang dan ada dendanya. Sehingga, apabila diterapkan pengenaan denda pada sanksi administratif, kemudian dikenakan denda kembali maka akan menjadi tidak lazim.
   c) Karena batas Laporan Kinerja Operasi ("**LKO**") untuk tahun sebelumnya adalah tanggal 30 April.
   d) Dalam hal Penyelenggara telekomunikasi terlambat melakukan pelaporan, maka dalam 1 (satu) bulan pertama akan disampaikan surat peringatan dengan denda 2% (dua persen). Apabila masih belum melaporkan LKO dan belum membayar maka akan disampaikan kembali surat peringatan beserta denda 2% (dua persen), begitu pula dengan bulan ketiga dikenakan surat peringatan dan denda sebesar 2% (dua persen) apabila masih belum melakukan pelaporan LKO.
   e) Perhitungan demikian dipandang tidak adil bagi penyelenggara telekomunikasi karena akan merasa terbebani. Mengingat bahwa sejumlah penyelenggara telekomunikasi sedang melakukan pemulihan pasca pandemi COVID-19.
   f) Atas *Call for Proposal* ini, PT Jasnita Telekomindo memberikan usulan agar APJII dapat menyampaikan keberatan ini kepada Kominfo.

2. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2022 tentang Ketentuan Teknis Kewajiban Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang

Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, serta Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Telekomunikasi), dengan usulan sebagai berikut:

a) Kedua Pasal tersebut pada intinya mengatur tentang kewajiban yang terdiri atas:
   1) Kewajiban pembangunan layanan;
   2) Kewajiban penyediaan layanan;
   3) Kewajiban pembangunan sekaligus kewajiban penyediaan layanan.
b) Pasal 13 PP No. 46/2021 berpotensi multitafsir dalam interpretasinya, dengan penggunaan kalimat "dan/atau" dan perlu dipertimbangkan agar tidak menjadi beban tambahan bagi perusahaan telekomunikasi.
c) Implikasi dari kewajiban tersebut adalah seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi harus melakukan pembangunan, sehingga tidak dapat dilakukan kerja sama. Hal ini bertentangan dengan peraturan sebelumnya, yang dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan sesama penyelenggara telekomunikasi.
d) Apabila Pemerintah mewajibkan untuk melakukan pembangunan, maka hal ini akan memberatkan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal pembiayaan.
e) Oleh karena itu, diusulkan agar dalam Rancangan Peraturan tersebut tidak memberikan beban baru kepada perusahaan telekomunikasi yang berupa kewajiban Pembangunan Infrastruktur (seperti *ducting*, *fiber optic* dan lain sebagainya).
f) Sebelumnya PT Jasnita Telekomindo sudah pernah mengusulkan kepada Kominfo untuk penyelenggara telekomunikasi saling bekerja sama dalam membangun infrastruktur di suatu wilayah dengan mekanisme sewa *port*.

3. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dengan usulan sebagai berikut:
   a) Hal ini hanya berlaku bagi sebagian Anggota APJII yang memiliki kegiatan usaha sebagai penyelenggara *call center*. Apabila terdapat penyelenggara atas kode akses 3 digit, maka akan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**") sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).
   b) Rencana pengenaan PNBP berpotensi merugikan penyelenggara *call center*. Karena, biaya yang dikeluarkan termasuk perhitungan pendapatan yang sudah dilakukan tanpa memperhitungkan komponen adanya PNBP.
   c) Diusulkan agar PNBP tidak langsung diberlakukan terhadap penyelenggara *call center* atau diberikan solusi agar pengenaan PNBP jika diberlakukan tidak mengakibatkan kerugian pada penyelenggara *call center*.

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan usulan sebagai berikut:
   a) Beberapa waktu yang lalu, PT Jasnita Telekomindo telah diundang untuk rapat bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**"LKPP"**) mengenai pembahasan PNBP terhadap penyelenggara telekomunikasi atas akses Layanan Pengadaan Secara Elektronik (**"LPSE"**).
   b) Diusulkan agar PNBP sebesar 0.40% (nol koma empat puluh persen) yang dikenakan terhadap penyelenggara telekomunikasi atas penggunaan dan akses LPSE diputuskan untuk tidak diberlakukan. Hal ini karena penyelenggara telekomunikasi sudah dibebankan kewajiban PNBP BHP dan USO.
   c) Bahwa yang menjadi polemik adalah LKPP dapat meminta kepada Telkom untuk memenuhi kebutuhan layanan apabila ditengah-tengah dibutuhkan penambahan layanan. Ternyata Telkom dapat mendelegasikan operasinya kepada perusahaan pemenang tender. Sehingga cukup banyak proses dan birokrasi yang tidak sesuai dengan Perpres No. 17/2023.
   d) PT Jasnita Telekomindo telah melakukan koordinasi dan rapat, akan tetapi tidak banyak hal yang dapat dilakukan.
5. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor PI, dengan usulan sebagai berikut:
   a) Sehubungan dengan ketentuan dalam BAB III huruf a angka 10 ayat (3f) Konsep Batang Tubuh Revisi PM No. 32/2015, diusulkan agar APJII tetap dimasukan sebagai Anggota forum PI Nasional.
   b) Apabila APJII dikeluarkan dalam forum Nasional, perlu dipertimbangkan mengenai nasib dari penyelenggara telekomunikasi yang hanya mengikuti satu asosiasi saja, dalam hal ini APJII. Hal ini perlu untuk diperhatikan dan diakomodir karena bagi perusahaan-perusahaan yang hanya tergabung di APJII agar dapat selalu menyampaikan pendapatnya melalui APJII pada forum PI Nasional tersebut.
   c) Menghilangkan frasa "dapat" dalam BAB IV huruf a angka 14 Ayat (1) Konsep Batang Tubuh Revisi PM No. 32/2015, sehingga rumusan ketentuan tersebut menjadi:

      "Menteri memberikan hak pengelolaan Nomor PI dalam bentuk konsesi kepada badan hukum yang telah mendapatkan hak pengelolaan dari Pengelola Nomor PI Regional (APNIC)."

      Mengusulkan agar Pengelola Nomor PI Lokal adalah pihak yang melakukan distribusi kepada *end users* yaitu perusahaan penyelenggara jasa internet (*internet service provider*).
   d) Mengusulkan agar ketentuan mengenai *broker*/pialang Nomor PI dihapus dalam Rancangan tersebut, karena tidak pernah ditemukan

Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

adanya ketentuan terkait hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang telekomunikasi.

e) Mengusulkan agar diatur mekanisme pengalihan Nomor PI antar pengguna Nomor PI yang dapat memuat prinsip-prinsip Tata Kelola Pengelolaan Nomor PI yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f) Mengusulkan agar penggunaan Nomor PI di wilayah Indonesia wajib didaftarkan oleh Pengguna Nomor PI kepada Pengelola Nomor PI Nasional, meskipun alokasi Nomor PI tersebut didapatkan dari Pengelola Nomor PI Regional (APNIC).

g) Mengusulkan agar Permohonan Nomor PI dapat diajukan kepada APNIC selaku Pengelola Nomor PI Regional sebagaimana ditetapkan oleh APNIC.

B. Tanggapan Atas Usulan Kebijakan *Call for Proposal* 2

1. Tanggapan/Usulan 1:
   - Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia menyampaikan bahwa sebaiknya usulan-usulan dalam *Call for Proposal* 2 ini disampaikan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai broker Nomor PI.
   - Definisi mengenai broker belum diatur secara jelas yang di mana jika hal ini diberlakukan akan membawa dampak yang besar khususnya dalam regulasi terkait Nomor PI di Indonesia.
   - **Jawaban Ibu Chia dari PT Jasnita Telekomindo atas tanggapan Pak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia:**
     - Bahwa PT Jasnita Telekomindo sebelumnya telah diundang oleh Kominfo untuk membahas mengenai Rancangan PM No. 32/2015, pada rapat tersebut PT Jasnita Telekomindo menemukan adanya istilah mengenai broker dalam BAB VI angka 21 pada rancangan perubahan peraturan tersebut.
     - PT Jasnita Telekomindo sudah meminta informasi lebih jelas mengenai subyek yang dikategorikan sebagai broker kepada Kominfo dan PT Jasnita Telekomindo juga sudah memberikan usulan untuk menghapus mengenai eksistensi broker yang akan merugikan penyelenggara telekomunikasi.

2. Tanggapan/Usulan 2:
   - Bapak Darmawan dari PT Indonesia Telekomunikasi Teknologi, memiliki usaha yang sama dengan PT Jasnita Telekomindo yaitu sebagai penyelenggara jasa internet dan penyedia *call center*. Perusahaan Bapak Darmawan juga menyampaikan keberatan yang sama kepada Kominfo

terkait wacana pembayaran PNBP yang akan diberlakukan dalam sektor usaha *call center*.

- Layanan *call center* dianggap sebagai pendapatan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, layanan *call center* dikenakan PNBP.

3. Tanggapan/Usulan 3:
   - Bapak Lailun Syukran dari PT Alfatih Indo Teknologi meminta ditunjukan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban PNBP 0.40% (nol koma empat puluh persen) dalam LKPP LPSE dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
   - **Jawaban Ibu Chia dari PT Jasnita Telekomindo atas tanggapan Bapak Lailun Syukran dari PT Alfatih Indo Teknologi:**
     - Saat menghadiri rapat bersama dengan Kominfo, Ibu Chia meminta konfirmasi mengenai kewajiban PNBP LKPP LPSE sebesar 0.40% (nol koma empat puluh persen) tersebut kepada Kominfo. Penambahan PNBP pada LPSE LKPP, tentu memberatkan bagi penyelenggara telekomunikasi. Padahal layanan tersebut dibuat untuk mempermudah bagi perusahaan penyelenggara jasa internet. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak Kominfo.

4. Tanggapan/Usulan 4:
   Bapak Firdhyan Adhi Lesmana dari PT Kawan Informatika Teknologi Abadi menyampaikan apabila tidak bisa ditampilkan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut terkait kewajiban PNBP 0.40% (nol koma empat puluh persen) bagi LKPP LPSE, maka sebaiknya tidak dibahas dalam forum ini.

5. Tanggapan/Usulan 5:
   Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten memberikan pandangan bahwa terkait dengan usulan yang telah disampaikan sebaiknya dimintai persetujuan peserta apakah perlu membahas mengenai peraturan-peraturan ini di OPM kali ini. Bapak Syarifuddin mengusulkan pembahasan mengenai usulan ini sebaiknya dibahas oleh program dari Bidang Regulasi dan Advokasi.

6. Tanggapan/Usulan 6:
   Bapak Willy Rinaldi Amin dari PT Quanta Tunas Abadi sepakat dengan pemikiran Bapak Firdhyan Adhi Lesmana dari PT Kawan Informatika Teknologi Abadi dan Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten untuk membahas ini lebih lanjut oleh Ketua Bidang terkait.

C. Keputusan Atas Usulan Kebijakan

1. Peserta OPM APJII Tahun 2023 menyepakati pembahasan usulan-usulan yang disampaikan PT Jasnita Telekomindo akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengurus.

IV. OPM SESSION 4: PRESENTASI USULAN KEBIJAKAN TEKNIS IIX APJII

A. Penyampaian Usulan Kebijakan 1 "*Logical Cross Connect* (LXC)"

1. Pemaparan Materi

a) IIX-APJII cukup unik karena berbasis komunitas yang dasar kebijakannya dari APJII oleh APJII untuk APJII. Sehingga diperlukan penguatan terhadap IIX-APJII.

b) Latar belakang dari usulan kebijakan ini adalah agar memudahkan *Cross Connect* (XC) antar perusahaan penyelenggara jasa internet tanpa membutuhkan kabel lagi. Selain itu, akan menghemat penggunaan *Port*.

c) Manfaat dari usulan kebijakan ini salah satunya adalah agar *Data Center* APJII lebih rapi dan teratur dikarenakan koneksi fisik yang ada pun menjadi sedikit.

d) Diusulkan agar tidak dikenakan biaya bagi Anggota Penyelenggara APJII, karena relevansinya hanya pada Anggota Penyelenggara. Dan ketentuan penggunaan *Port* merujuk pada peraturan-peraturan mengenai *Port* IIX.

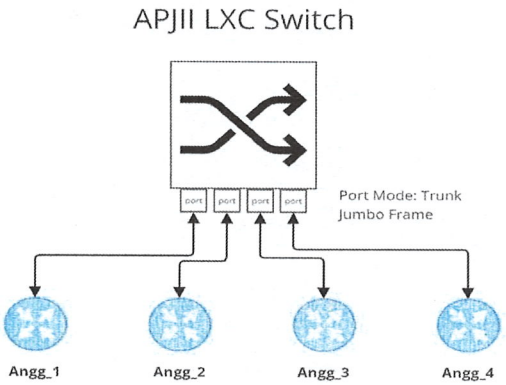
e) Fitur-fitur dalam *Logical Cross Connect* (LXC) ini antara lain:

i) *VLAN Translation*;
ii) *Allowed Ethernet Frame: Jumbo Frame, Q-in-Q, MPLS*;
iii) *forward Database* (FDB) *MAC Address Max*: 20 per *VLAN*;
iv) *Looping protection Spanning-Tree* per *VLAN*;
v) *Storm Control*; dan
vi) *Web Console* (Anggota bisa mengakses menggunakan portal).

f) Contoh skenario:

i) Angg_1:v10 <-> Angg_2:v20
ii) Angg_1:v20 <-> Angg_3:v30
iii) Angg_2:v40 <-> Angg_3:v10
iv) Angg_3:v50 <-> Angg_4:v90

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id



2. **Tanggapan Atas Usulan Kebijakan 1 "*Logical Cross Connect* (LXC)"**
   a) Tanggapan/Usulan 1:
      - Bapak Wenas Ongkowinoto dari PT Media Cepat Indonesia - JTL, mempertanyakan apakah terdapat *Service Level Agreement* (SLA) meskipun diberlakukan secara gratis.
      - Selain itu, Bapak Wenas mempertanyakan apakah LXC tersebut akan menggunakan *Port* baru dan apakah dapat interkoneksi dengan *Node* IIX lainnya.
      - **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Wenas Ongkowinoto dari PT Media Cepat Indonesia - JTL:**
        - Melalui studi banding, diperoleh informasi bahwa hal ini sudah dilakukan oleh Data Center lain. Ketika VLAN tersedia maka dapat langsung tersambung.
        - Mekanismenya kemungkinan akan disamakan dengan mekanisme *Port* yang sudah *congestion*. Dan *Port* yang akan digunakan adalah *Port* baru.
        - Bapak Syarif menjawab bahwa tidak akan terkoneksi dengan *Node* IIX, hanya dalam *Data Center* saja.

   a) Tanggapan/Usulan 2:
      - Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia menyampaikan perlu diberikan penjelasan mengenai makna dari *Call for Paper*.

   b) Tanggapan/Usulan 3:
      - Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten menyampaikan LXC memiliki tujuan yang bagus karena akan meminimalisasi perangkat fisik. Sehingga dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai LXC dalam bentuk fisik.

TUV NORD Indonesia ISO 27001:2013 Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
ISO 9001 SGS UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

- Apabila APJII hendak membuat 2 (dua) kebijakan yang berbeda akan tetapi berhubungan, maka perlu dibahas secara bersamaan agar tidak mengunci suatu ketetapan yang tidak sejalan dengan ketetapan sebelumnya yang berhubungan.
- **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten:**
  Perlu ditegaskan kembali bahwa yang menentukan adalah APJII secara bersama berdasarkan asas kebermanfaatan. Apabila LXC yang diberikan secara gratis tidak digunakan dan tidak ada *traffic*-nya, maka tidak diperoleh kebermanfaatan. Karena LXC hanya ada dalam *Data Center,* tidak terdapat pada *Node* IIX-APJII.

c) Tanggapan/Usulan 4:
Bapak Valentinus Yanuar Riyadi dari PT Jembatan citra Nusantara memberikan usulan untuk menunda pembahasan ini sampai dengan adanya aturan mengenai pembahasan *cross connect* fisik.

d) Tanggapan/Usulan 5:
- Bapak Lailun Syukran dari PT Alfatih Indo Teknologi mengusulkan bahwa perihal LXC perlu diatur terlebih dahulu mekanismenya sebelum disetujui.
- **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Bapak Lailun Syukran dari PT Alfatih Indo Teknologi:**
  LXC bukan kebijakan yang dipaksakan. Akan tetapi, fasilitas ini dapat digunakan bagi Anggota yang merasa terdapat kebermanfaatan pada LXC. Lebih lanjut, LXC tidak mengurangi kualitas layanan *Data Center* di APJII. LXC merupakan fitur yang lazim pada sejumlah IIX.

B. Penyampaian Usulan Kebijakan 2 "Koneksi IIX 1 ASN 2 IP-IIX"

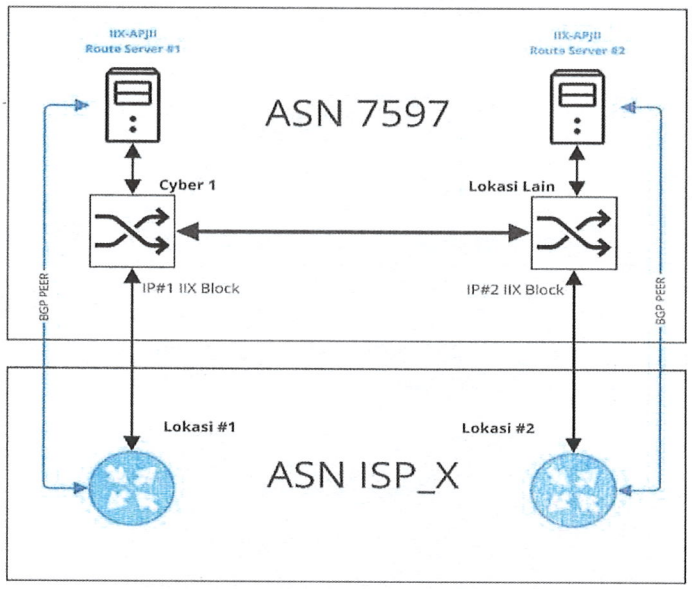
1. Pemaparan Materi

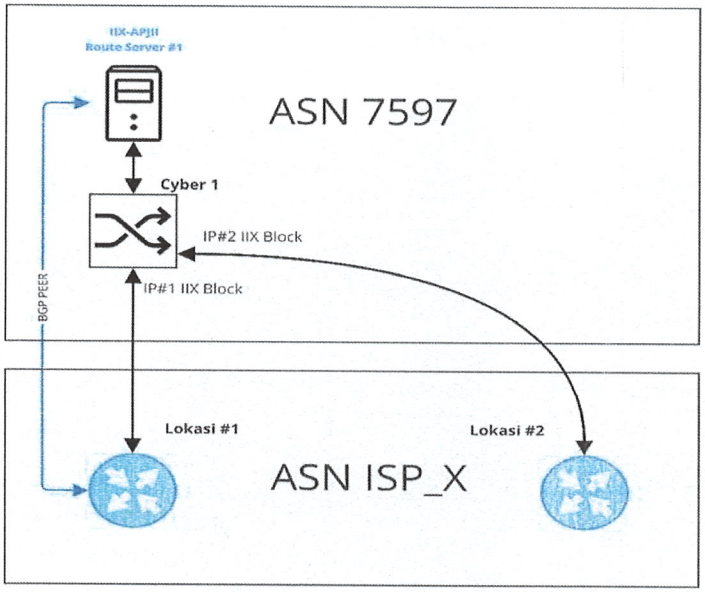
a) Saat ini APJII sudah bekerja sama dengan Data Center Tier-3. *Bandwith* ini akan disalurkan kepada *Data Center* yang terhubung kerja sama tersebut.

b) Latar belakang dari usulan kebijakan ini adalah dikarenakan koneksi 1 (satu) ASN dan 2 (dua) koneksi IIX mengakibatkan bertambah besarnya *bandwith* Anggota IIX terkait. Maka, hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *traffic* IIX. Dan karena itulah, dibutuhkan *redudancy* dan/atau penambahan kapasitas.

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

c) Dampak dari usulan kebijakan ini salah satunya adalah terjadinya *diversity site* terhadap Anggota IIX tersebut.
d) Diusulkan agar maksimal 1 (satu) ASN dapat melakukan 2 (dua) koneksi IIX dengan lokasi fisik perangkat Anggota IIX yang berbeda.
e) Kebijakan ini diusulkan agar khusus diperuntukan bagi Anggota IIX dengan *Port* >= 40G.





TUV NORD Indonesia ISO 27001:2013 Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
SGS ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

2. **Tanggapan Atas Usulan Kebijakan 2 "Koneksi IIX 1 ASN 2 IP-IIX"**
   a) Tanggapan/Usulan 1:

      Bapak Wenas Ongkowinoto dari PT Media Cepat Indonesia - JTL menyetujui agar 1 ASN mendapatkan 2 IP-IIX, mengingat bahwa hal ini dilakukan tanpa paksaan.

C. Penyampaian Usulan Kebijakan 3 "Cross Connect (XC) Fisik Berbayar"

1. **Pemaparan Materi**
   a) Latar belakang dari usulan kebijakan ini adalah SIM Card pada masa kini harganya sudah sangat murah. Apabila biaya berlangganan tidak dibayarkan, maka kartunya akan *expired*. Karena, kartu tersebut memiliki limitasi di operator. Dari sisi operator, tidak diketahui mengenai status penggunaan yang masih digunakan atau tidak. Oleh sebab itu ada biaya berlangganan.
   b) Dalam hal ini APJII berperan sebagai operator yang tidak mengetahui mengenai status penggunaan kabel *cross connect* yang masih digunakan atau tidak.
   c) Pada praktiknya, banyak terjadi tarikan baru yaitu 150 (seratus lima puluh) s.d. 200 (dua ratus) tarikan per bulan, yang ternyata sebagian besar tarikan tersebut tidak terpakai serta tidak adanya permintaan *dismantle*.
   d) Selain itu, banyak ditemukan fakta bahwa kabel yang digunakan melebihi panjang yang dibutuhkan.
   e) Dampak kedua hal sebagaimana disebutkan di atas adalah terjadinya penumpukan kabel di *tray* dan di atas rak, meskipun sudah ada tim perapihan kabel. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan identifikasi kepemilikan kabel menjadi semakin sulit.
   f) Untuk mengatasi hal-hal tersebut, diusulkan agar:
      (1) Untuk tarikan berbayar, diutamakan menggunakan kabel optik dengan alasan diameter yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kabel UTP. Biaya instalasi diusulkan untuk digratiskan dan kabel tersebut disiapkan oleh Anggota.
      (2) Biaya penggunaan akan ditagihkan kepada pihak Inisiator sebesar:
         - FO: Rp100.000 (*seratus ribu rupiah*) per bulan atau Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per tahun; dan
         - UTP: Rp100.000 (*seratus ribu rupiah*) per bulan atau Rp1.200.000 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) per tahun.

(3) Diusulkan agar hanya diberlakukan di NOC-APJII DKI Jakarta dan tidak berlaku untuk koneksi ke IIX-APJII.

(4) Terakhir, hal ini diperuntukan hanya untuk kabel *existing* dan baru, yang akan diberlakukan 6 (enam) bulan setelah kebijakan ini disahkan.

2. Tanggapan Atas Usulan Kebijakan 3 "Cross Connect (XC) Fisik Berbayar"

a) Tanggapan/Usulan 1:

- Bapak Willy Rinaldy Amin dari PT Quanta Tunas Abadi mempertanyakan korelasi antara biaya Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*) per tahun dengan adanya penumpukan kabel. Fenomena terjadinya penumpukan kabel tidak dapat dinilai sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*) per tahun, mengingat bahwa hal ini lebih berfokus pada permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM).
- **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Bapak Willy Rinaldy Amin dari PT Quanta Tunas Abadi:**
  Memantik perlunya usulan dari Anggota mengenai NOC-APJII dalam hal menyikapi status dari kabel yang terpakai dan tidak terpakai. Solusinya terletak pada kesadaran pada masing-masing Anggota.

b) Tanggapan/Usulan 2:

- Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten memberikan pandangan agar dikonfirmasi mengenai biaya dan *maintenance* dari penggunaan kabel yang disediakan oleh NOC-APJII.
- Bapak Syarifuddin menyetujui mengenai usulan kebijakan ketiga ini jika kabel disediakan oleh APJII.

c) Tanggapan/Usulan 3:

- Bapak Ricky Simanjuntak dari PT Parsaoran Global Datatrans mempertanyakan justifikasi atas wacana kenaikan harga tersebut.
- Lebih lanjut, menyetujui tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Syarifuddin agar kenaikan harga ini dapat diberlakukan apabila kabel disediakan oleh APJII.
- **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Bapak Ricky Simanjuntak dari PT Parsaoran Global Datatrans dan tanggapan Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten:**

Bapak Syarif mengingatkan bahwa yang lebih penting untuk dipikirkan adalah bagaimana mekanisme yang tepat untuk diberlakukan agar NOC-APJII memiliki pengetahuan mengenai status kabel yang masih digunakan atau tidak (*dismantle*).

d) Tanggapan/Usulan 4:
   - Bapak Michael Takeuchi dari PT Media Cepat Indonesia, mempertanyakan langkah apa yang dapat dilakukan apabila terjadinya kabel rusak dengan adanya *Cross Connect* berbayar ini.
   - Pada dasarnya kabel berasal dari Anggota. Apabila XC Fisik berbayar diterapkan, maka perlu dikonfirmasi mekanisme penarikannya.
   - **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Bapak Michael Takeuchi dari PT Media Cepat Indonesia:**
     - Menyepakati bahwa kabel tetap berasal dari Anggota mengingat bahwa Anggota memiliki preferensinya tersendiri. Bapak Syarif mempertanyakan mekanisme yang perlu diatur adalah agar NOC-APJII memiliki pengetahuan mengenai status kabel yang masih digunakan atau tidak (*dismantle*).
     - Meskipun NOC-APJII sudah memiliki tim perapihan kabel, akan tetapi selalu tidak tercapai target penyelesaian. Sehingga, diusulkan biaya penggunaan sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*) per tahun.

e) Tanggapan/Usulan 5:
   - Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten menyetujui jika persoalan *dismantle* diberikan usulan XC Fisik Berbayar. Akan tetapi, Bapak Syarifuddin tidak setuju jika tidak ada manfaat di kemudian hari setelah kenaikan harga ditetapkan. Maka dari itu, diusulkan agar kabel disediakan oleh APJII.
   - **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Bapak Syarifuddin PT Putra Lebak Banten:**
     Harapannya, usulan ini dapat dipertimbangkan agar tidak terjadi *dismantle* kembali pada kemudian hari.

f) Tanggapan/Usulan 6:
   - Muhammad Fawzy dari PT Mamura Inter Media memberi tanggapan bahwa penyeragaman ini dipandang perlu sebagai

bentuk standarisasi. Walaupun saat ini terdapat kebijakan pembayaran, Bapak Fawzy menyetujui adanya kenaikan harga mengingat kuantitas kabel yang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

- **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Muhammad Fawzy dari PT Mamura Inter Media:**
  LXC merupakan sebuah usulan dan solusi untuk menyikapi XC Fisik. Diberlakukannya kenaikan harga XC fisik berbayar ini mempunyai tujuan agar bermanfaat bagi Anggota APJII kedepannya.

g) Tanggapan/Usulan 7:
Bapak Danang Wijayanto dari PT Data Prima Solusindo menyampaikan perlu disadari bahwa apa yang disampaikan oleh Dewan Pengurus adalah untuk kebaikan Anggota bersama. Oleh karena itu, mengusulkan agar langsung diusulkan solusi konkritnya.

h) Tanggapan/Usulan 8:
Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia mengusulkan untuk diberlakukannya *self assessment* yang dapat dilakukan oleh setiap penyelenggara jasa internet dengan jangka waktu sebagai contoh selama 6 (enam) bulan.

i) Tanggapan/Usulan 9:
Bapak Valentinus Yanuar Riyadi dari PT Jembatan Citra Nusantara mengusulkan terkait mekanisme dan teknis diusulkan untuk dibahas secara terpisah melalui forum lain, misalnya melalui Kelompok Kerja. Mengingat bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan pembahasan yang perlu dilakukan secara mendalam.

j) Tanggapan/Usulan 10:
Bapak Wenas Ongkowinoto dari PT Media Cepat Indonesia - JTL berpendapat bahwa usulan kebijakan ini terkesan seperti menghukum Anggota akibat kesalahan yang dilakukan oleh Anggota lain.

k) Tanggapan/Usulan 11:
Bapak Obi Agam PT Julia Multimedia Nusantara mengusulkan agar dapat diberlakukan perpanjangan kontrak dengan notifikasi yang dikirimkan oleh APJII kepada Anggota. Kemudian, apabila notifikasi tidak

disetujui oleh Anggota pada aplikasi, maka kabelnya akan dilakukan *dismantle* oleh NOC-APJII.

(m) Tanggapan/Usulan 12:

- Bapak Willy Rinaldi Amin PT Quanta Tunas Abadi memberikan pernyataan tidak setuju karena 1jt bagi ISP masih cukup besar. Solusinya, APJII memiliki SDM untuk melakukan maintenance. Dipandang perlu untuk melakukan penguatan SDM. Sehingga penagihan kepada Anggota tidak diperlukan lagi.
- **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Bapak Willy Rinaldi Amin PT Quanta Tunas Abadi:**
  Dewan Pengurus pada beberapa waktu lalu berpendapat bahwa *Tray* yang dimiliki APJII pada masa kini sudah cukup. Akan tetapi, menurut Bapak Syarif tidak cukup mengingat bahwa Anggota yang terus bertambah. Usulan penagihan ini dipandang perlu dengan mempertimbangkan filosofi dari sesuatu yang dimulai harus diakhiri juga, penumpukan terhadap kabel tidak dapat dibiarkan.

(n) Tanggapan/Usulan 13:

Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia memberikan pandangan forum yang akan dibentuk untuk pembahasan cross connect fisik tidak dapat serta merta menentukan keabsahannya. Mengingat bahwa kebijakan tersebut harus disahkan melalui mekanisme OPM.

D. Penyampaian Usulan Kebijakan 4 "Port IIX 100G Berbayar"

1. Pemaparan Materi

a) Dibutuhkannya modul yang harganya relatif mahal bagi *Port* 100G. Selain itu, Anggota yang sudah menggunakan *Port* 100G mendapatkan manfaat dari fasilitas ini.

b) *Capex* modul diperkirakan senilai Rp3.400.000.000 (*tiga koma empat milyar rupiah*) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) *Port* 100G. *Capex* per *Port* diperkirakan senilai Rp95.000.000 (*sembilan puluh lima juta rupiah*), dengan jangka waktu umur perangkat yang diasumsikan 48 (empat puluh delapan) bulan. Oleh karena itu, *Opex* per *Port* diperkirakan memakan biaya Rp1.900.000 (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*).

c) Untuk mengatasi hal-hal tersebut, diusulkan agar biaya penggunaan *Port* 100G sebesar Rp2.000.000 (*dua juta rupiah*) s.d. Rp5.000.000 (*lima juta rupiah*) per bulan dan akan diberlakukan 6 (enam) bulan setelah

Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

kebijakan ini disahkan. Kebijakan ini diusulkan agar hanya diberlakukan di IIX-APJII DKI Jakarta.

2. Tanggapan Atas Usulan Kebijakan 4 "Port IIX 100G Berbayar"

a) Tanggapan/Usulan 1:

Bapak Wenas Ongkowinoto dari PT Media Cepat Indonesia - JTL menyampaikan bahwa dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap pembelian perangkat tersebut. Berdasarkan MoU yang dijadikan dasar pendirian APJII, selama menjadi Anggota Penyelenggara tidak ada pengaturan mengenai kepemilikan *Port*. Sehingga, apabila hal ini disepakati dalam OPM Tahun 2023, akan berimplikasi terhadap instrumen hukum lainnya yang berlaku bagi APJII.

b) Tanggapan/Usulan 2:

Bapak Henry dari PT Arthatama Adhiprima Persada mengusulkan untuk membahasnya dalam forum lain. Mengingat bahwa pembahasan ini terkait dengan usulan biaya terhadap *Port* IIX 100G berbayar.

c) Tanggapan/Usulan 3:

Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia menyatakan bahwa dipandang perlu untuk pembahasan *Port* IIX 100G berbayar tidak dilakukan secara terburu-buru. Modul yang disediakan sebaiknya berasal dari Anggota, bukan dari APJII.

d) Tanggapan/Usulan 4:

Bapak Supriyanto dari PT Giga Prima Lestari menyampaikan perlu dikonfirmasi mengenai utilitas dari *Port* apabila terjadi *error* dan harus ditinjau kembali mengenai pendanaan APJII dalam hal penanganan hal tersebut. Apabila APJII membiayai *Port* IIX dalam bentuk besar, akan menjadi kurang bijak untuk dilaksanakan mengingat pihak yang menikmati adalah Anggota yang memiliki modal besar.

e) Tanggapan/Usulan 5:

Bapak Wenas Ongkowinoto dari PT Media Cepat Indonesia - JTL, Bapak Michael Takeuchi PT Cepat Indonesia, dan Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten menyetujui usulan *Port* IIX 100G Berbayar namun tidak berlaku bagi Anggota Penyelenggara APJII, mengingat sebelumnya sudah terdapat MoU terkait *Port* yang tidak dikenakan biaya bagi Anggota Penyelenggara.

f) Tanggapan/Usulan 6:
Bapak Michael Takeuchi dari PT Media Cepat Indonesia menyampaikan bahwa pembahasan ini tidak dapat dilakukan dan diputuskan pada saat ini, mengingat hal ini memiliki implikasi dan tanggung jawab yang cukup besar bagi Anggota Penyelenggara.

g) Tanggapan/Usulan 7:
Bapak Supriyanto dari PT Giga Prima Lestari memberikan pandangan bahwa diperlukan peninjauan kembali mengenai dampak-dampak yang dapat timbul di kemudian hari. Sehingga dipandang perlu untuk membuat forum lain untuk membahas *Port* IIX 100G Berbayar.

E. Penyampaian Usulan Kebijakan 5 "Aturan Downgrade Port >=20G"

1. Pemaparan Materi

a) Latar belakang usulan kebijakan ini adalah trafik yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) rata-rata per minggu, dari total *Port* yang dialokasikan sehingga terbuang sia-sia.

b) Oleh karena itu, diusulkan agar *downgrade Port* sesuai tabel sebagaimana berikut:

LAG	Gbps	Berlaku Aturan Downgrade	Kondisi
2x10G	20	Berlaku	Traffik <= 8 G
	40	Berlaku	Traffik <= 16 G
	100	Berlaku	Traffik <= 32 G
2x100G	200	Berlaku	Traffik <= 80 G

c) Evaluasi dilakukan pada 3 (tiga) bulan penggunaan.

2. Tanggapan Atas Usulan Kebijakan 5 "Aturan Downgrade Port >=20G"

a) Tanggapan/Usulan 1:

- Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten memberikan pandangan bahwa terdapat dampak bahwa layanan tidak dapat digunakan apabila terjadi penurunan atau *downgrade Port*. Perlu dikonfirmasi mengenai solusi yang akan diimplementasikan oleh APJII mengenai hal tersebut.
- **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Bapak Syarifuddin dari PT Putra Lebak Banten:**
  Solusinya adalah dapat diberikan surat himbauan kepada Anggota bahwa *Port*nya kosong dalam waktu yang relatif lama.

b) Tanggapan/Usulan 2:
- Bapak Michael Takeuchi dari PT Media Cepat Indonesia menyampaikan bahwa perlu dikonfirmasi Anggota Non-Penyelenggara yang tidak menghendaki memorinya mengalami kepenuhan.
- **Jawaban Bapak Syarif Lumintarjo atas tanggapan Bapak Michael Takeuchi dari PT Media Cepat Indonesia:**
  APJII akan tetap akan melakukan *downgrade*, karena tidak ada kebermanfaatannya.

c) Tanggapan/Usulan 3:
- Bapak Sugeng Riadi dari PT Madina Solusi Indonesia mengusulkan terkait mitigasi dan penerapan filter pada *tunnel* di *Port*. Mengingat bahwa terdapat dampak yang akan terjadi. Sehingga dipandang perlu untuk dikaji lebih lanjut.
- **Jawaban Bapak Firdhyan Adhi Lesmana selaku Moderator atas tanggapan Bapak Sugeng Riadi dari PT Madina Solusi Indonesia:**
  Dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja tersendiri yang akan membahas mengenai hal-hal yang bersifat teknis.

F. Penyampaian "Policy Terkait AS-SET dan IRR"

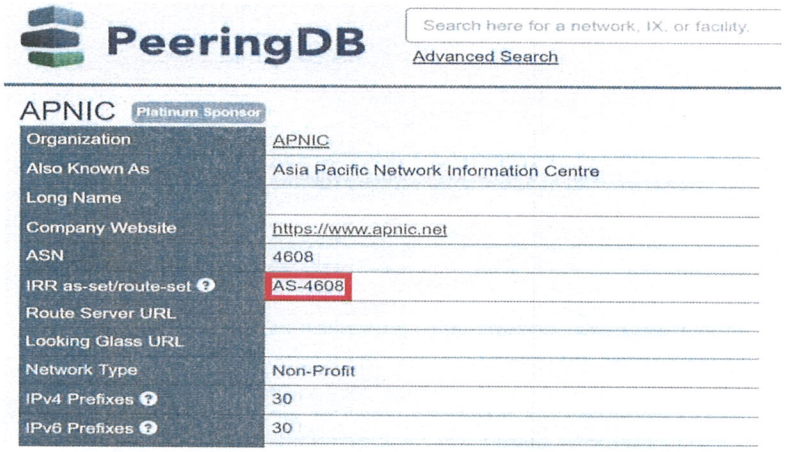
1. Pemaparan Materi

a) AS-SET adalah sebuah objek yang berisi informasi dari sebuah grup yang terdiri dari satu atau beberapa *Autonomous System Number* (ASN) yang biasanya juga digunakan untuk keperluan penerapan *routing policy*.

b) AS-SET berfungsi untuk menggambarkan jaringan dari suatu AS yang terkoneksi dengan AS lain. Dengan menambahkan atribut 'member' yang menunjuk ke ASN tersebut atau AS-SET lain, suatu entitas menunjukkan *prefix* mana yang harus diterima oleh BGP *neighbor* mereka. Berikut adalah dua contoh dari APNIC dan IDNIC yaitu sebagai berikut:

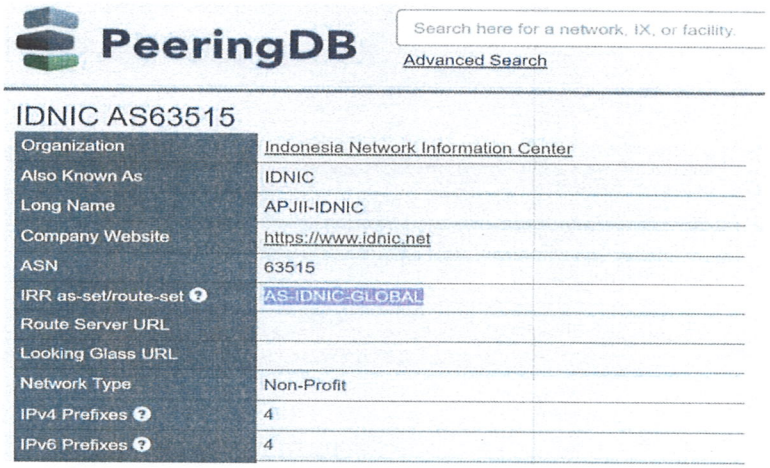
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

- **Contoh AS-SET (APNIC)**




```
root@ubuntu:~# whois -h whois.radb.net AS-4608
as-set:         AS-4608
descr:          APNIC AS4608 Downstream Peers
tech-c:         NO4-AP
admin-c:        HM20-AP
mnt-by:         MAINT-APNIC-IS-AP
last-modified:  2022-08-26T06:15:00Z
members:        AS18366, AS18368, AS18369, AS18370
members:        AS3557, AS7500, AS23708, AS25152, AS26415, AS396628
members:        AS4608, AS4777, AS45192, AS131072
members:        AS10906
source:         APNIC
root@ubuntu:~#
```

- **Contoh AS-SET IDNIC**



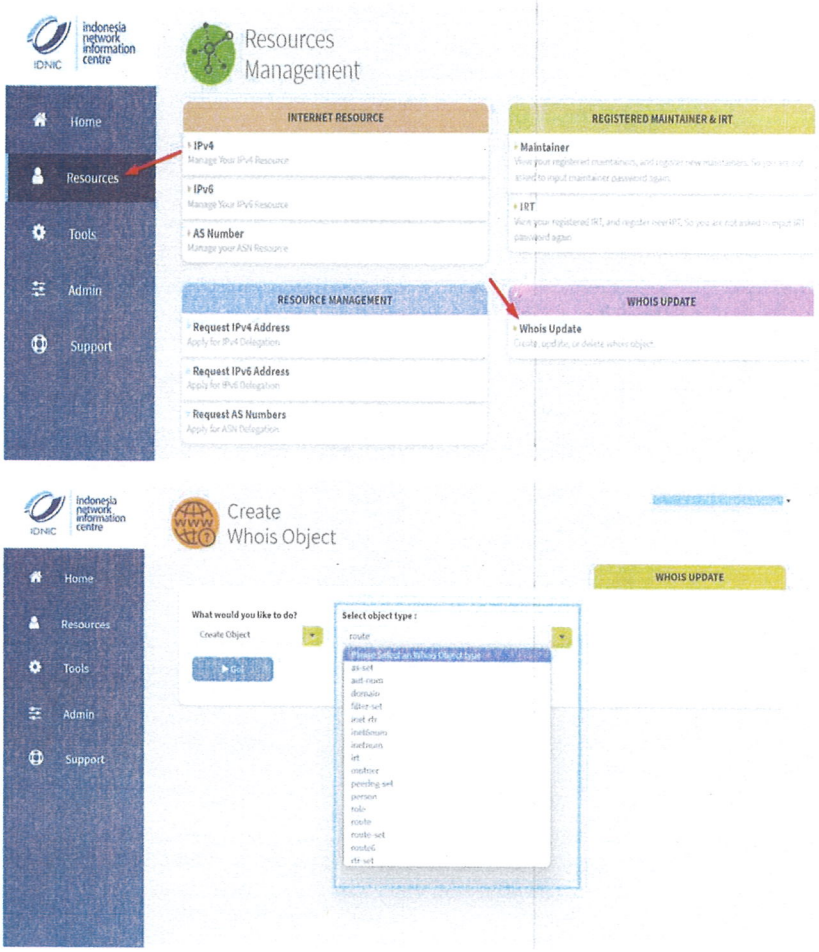
TUV NORD Indonesia ISO 27001:2013 Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
ISO 9001 SGS UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

```
root@ubuntu:~# whois -h whois.radb.net AS-IDNIC-GLOBAL
as-set:          AS-IDNIC-GLOBAL
descr:           Indonesia Network Information Centre
tech-c:          IA55-AP
admin-c:         IH123-AP
mnt-by:          MNT-APJII-ID
country:         ID
members:         AS63515
remarks:         Send abuse report to: abuse@idnic.net
last-modified:   2023-05-15T07:50:53Z
source:          IDNIC

as-set:          AS-IDNIC-GLOBAL
descr:           Indonesia Network Information Centre
tech-c:          IA55-AP
admin-c:         IH123-AP
mnt-by:          MNT-APJII-ID
country:         ID
members:         AS63515
remarks:         Send abuse report to: abuse@idnic.net
last-modified:   2023-02-16T11:09:39Z
source:          APNIC
root@ubuntu:~#
```

c) Berikut adalah cara membuat AS-SET di *my* IDNIC:



TUV NORD Indonesia ISO 27001:2013
Certified Company
Cert. No. 01 07 E 19004
CERTIFICATION DE SERVICES ISO 9001 SGS
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274



d) Terhadap hal-hal sebagaimana di atas, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:
   1) Saat ini, IIX menerapkan filter berdasarkan AS-SET.
   2) Ke depannya, tidak perlu mengirimkan *email* untuk *request allow prefix* baru. Karena dengan sistem baru ini, *request allow prefix* sudah dilakukan secara otomatis berdasarkan AS-SET yang dimiliki oleh *peering member* tersebut.
   3) Bagi ASN lain yang akan transit di bawah ASN yang merupakan *direct peer* dengan IIX, ASN yang menjadi *direct peer* dengan IIX tersebut perlu memperbarui objek AS-SET dengan menambahkan ASN yang akan transit sebagai anggota dari AS-SET yang dimilikinya.
   4) Dimohon untuk semua *peering member* IIX, untuk membuat akun di *peering* DB sebagai informasi dari AS-SET beserta informasi lain yang dimiliki dan AS-SET *object* yang sesuai.
   5) Lebih detail, dapat mengunjungi *website* https://iix.net.id/route-servers/.

2. Tanggapan Atas Usulan Kebijakan 6 "*Policy* Terkait AS-SET dan IRR

a) Bapak Aziz Priyatna dari PT Araz Inti Line memberikan pandangannya bahwa dipandang perlu untuk dilakukan pemutakhiran mengenai informasi mengenai sosialisasi terkait dalam *website* IIX dan pelatihan mengenai AS-SET dan IRR.

G. Keputusan Atas Usulan Kebijakan

1. Peserta OPM APJII Tahun 2023 menyepakati usulan terkait *Logical Cross Connect* (LXC) untuk diberlakukan dan tidak dikenakan biaya terhadap Anggota Penyelenggara APJII.
2. Selanjutnya, disepakati agar 1 (satu) ASN dapat melakukan 2 (dua) koneksi IIX dengan lokasi fisik perangkat Anggota IIX yang berbeda. Ketentuan ini disepakati untuk diberlakukan khusus bagi Anggota yang memiliki *Port* >= 40G.

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

3. Sehubungan dengan mekanisme mengenai solusi *Cross Connect* (XC) Fisik, disepakati untuk dibahas dalam forum terpisah.
4. Mengenai usulan *Port* 100G berbayar, juga disepakati untuk dibahas dalam forum terpisah.
5. Terkait aturan *downgrade* Port >= 20G yang akan diberlakukan terhadap perusahaan dengan *traffic* kurang dari 80% (delapan puluh persen), disepakati oleh Peserta OPM APJII Tahun 2023.
6. Perlu dilakukan sosialisasi secara khusus mengenai AS-SET dan IRR.

Certified Company
Cert. No. 01 07 E 19004
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

PENETAPAN HASIL KEPUTUSAN APJII OPEN POLICY MEETING (OPM) TAHUN 2023

A. OPM SESSION 1: SOSIALISASI PERATURAN ASOSIASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN

1. Peserta OPM APJII Tahun 2023 menyepakati perubahan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keanggotaan yang tercantum dalam Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2023.
2. Untuk selanjutnya, APJII akan mengakomodir Perseroan Perorangan untuk dapat menjadi Anggota IDNIC-APJII.

B. OPM SESSION 2: PENYAMPAIAN PROPOSAL PT ARAZ INTI LINE (*CALL FOR PROPOSAL* 1)

1. Peserta OPM APJII Tahun 2023 menyepakati *Call for Proposal* 1 secara keseluruhan, ditetapkan bahwa jangka waktu mitigasi dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berdasarkan *traffic* MRTG IIX-APJII melalui pemberitahuan dari NOC-APJII kepada Anggota yang dilakukan 1 (satu) bulan setelah dilakukannya mitigasi.
2. Selanjutnya, disepakati adanya Surat Pemberitahuan dari NOC-APJII setelah dilakukannya mitigasi kepada Anggota sebagai pemilik *Port* yang telah melebihi 80% (delapan puluh persen) pemakaian *Port*/perangkat.
3. Anggota diberikan kesempatan untuk *upgrade Interface* setelah mitigasi yang dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
4. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dilakukan *upgrade*, maka terhadap *Port* tersebut akan dilakukan *soft block* berdasarkan pemberitahuan terlebih dahulu dari NOC-APJII.
5. NOC-APJII akan melakukan pencabutan kabel dari *Port* setelah dilakukannya *soft block* sebagaimana poin 4, agar dapat dimanfaatkan oleh Anggota APJII lainnya.

C. OPM SESSION 3: PENYAMPAIAN PROPOSAL PT JASNITA TELEKOMINDO (*CALL FOR PROPOSAL* 2)

1. Peserta OPM APJII Tahun 2023 menyepakati pembahasan usulan-usulan yang disampaikan PT Jasnita Telekomindo akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengurus.

D. OPM SESSION 4: PRESENTASI USULAN KEBIJAKAN TEKNIS IIX APJII

1. Peserta OPM APJII Tahun 2023 menyepakati usulan terkait *Logical Cross Connect* (LXC) untuk diberlakukan dan tidak dikenakan biaya terhadap Anggota Penyelenggara APJII.
2. Selanjutnya, disepakati agar 1 (satu) ASN dapat melakukan 2 (dua) koneksi IIX dengan lokasi fisik perangkat Anggota IIX yang berbeda. Ketentuan ini disepakati untuk diberlakukan khusus bagi Anggota yang memiliki *Port* >= 40G.

TUV NORD Indonesia ISO 27001:2013 Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
ISO 9001 SGS UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association
Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan 12710
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

3. Sehubungan dengan mekanisme mengenai solusi *Cross Connect* (XC) Fisik, disepakati untuk dibahas dalam forum terpisah.
4. Mengenai usulan *Port* 100G berbayar, juga disepakati untuk dibahas dalam forum terpisah.
5. Terkait aturan *downgrade* Port >= 20G yang akan diberlakukan terhadap perusahaan dengan *traffic* kurang dari 80% (delapan puluh persen), disepakati oleh Peserta OPM APJII Tahun 2023.
6. Perlu dilakukan sosialisasi secara khusus mengenai AS-SET dan IRR.

Demikian Berita Acara Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* APJII Tahun 2023 ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tentang Penetapan Hasil Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* APJII Tahun 2023.

Certified Company Cert. No. 01 07 E 19004
CERTIFICATE NUMBER : ID18/04274